

Determinasi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Selatan

Asmika Jaya ^{1*}, Diah Retno Dwi Hastuti ², Sri Astuty ³, Regina ⁴, Muhammad Syafri ⁵

^{1*,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Corresponding Email: asmikajaya198@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 1 Mei 2026; Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2026; Diterima 10 Agustus 2026; Diterbitkan 1 Oktober 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Jaya, A., Hastuti, D. R. D., Astuty, S., Regina, R., & Syafri, M. (2026). Determinasi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(5), 5057-5066. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i5.7084>.

Abstrak

Penyerapan tenaga kerja merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Di Provinsi Sulawesi Selatan, penyerapan tenaga kerja antar kabupaten/kota masih menunjukkan perbedaan dan fluktuasi, yang diduga dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti upah minimum, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel enam kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2017–2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Ketenagakerjaan. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier, serta pengujian hipotesis melalui uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan upah dan peningkatan kualitas pendidikan dalam mendorong penciptaan lapangan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Pendidikan; Penyerapan Tenaga Kerja; Pertumbuhan Ekonomi; Upah Minimum.

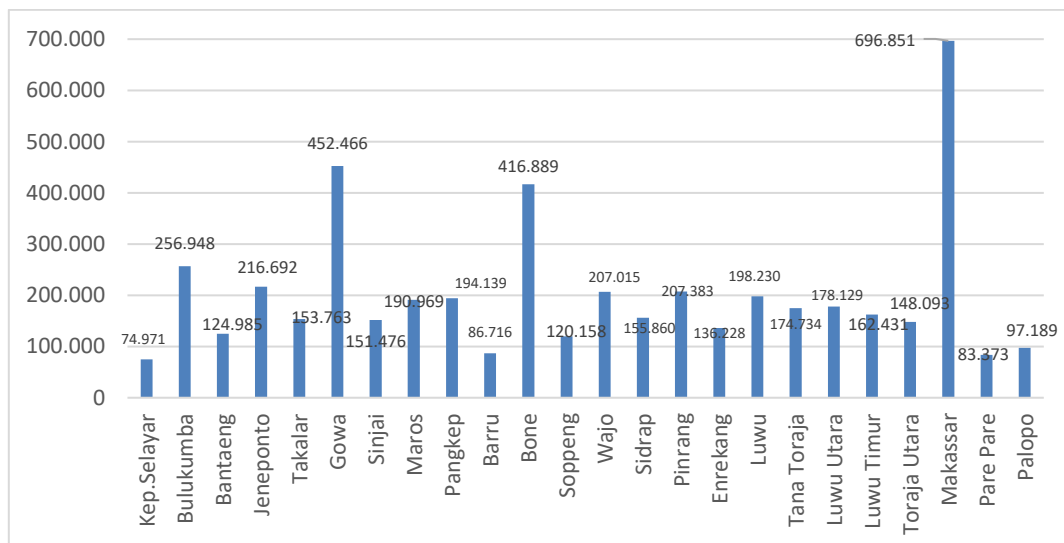
Abstract

Labor absorption is an important indicator in regional economic development. In South Sulawesi Province, labor absorption between districts/cities still shows differences and fluctuations, which are thought to be influenced by economic factors such as minimum wages, education levels, and economic growth. This study aims to analyze the influence of these three variables on labor absorption. This study uses a quantitative approach with panel data from six districts/cities in South Sulawesi Province for the period 2017–2024. The data were obtained from the Central Statistics Agency and the Manpower Office. The analysis was conducted using panel data regression with Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests, as well as hypothesis testing using t-tests and F-tests. The results show that, partially, minimum wage and education level have a positive and significant effect on labor absorption, while economic growth has no significant effect. Simultaneously, all three variables have a significant effect on labor absorption. These findings emphasize the importance of wage policies and improving the quality of education in promoting job creation in South Sulawesi Province.

Keyword: Economic Growth; Education; Labor Absorption; Minimum Wage.

1. Pendahuluan

Pekerjaan merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi karena menunjukkan kemampuan suatu daerah menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,) bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pemerataan tenaga kerja dapat diukur dengan tingkat penyerapan. Penyerapan tenaga kerja merupakan indikator utama yang mencerminkan kemampuan perekonomian dalam rangka menyediakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif (Todaro & Smith, 2006). Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja menandakan perekonomian yang sehat dan inklusif, sedangkan rendahnya penyerapan menunjukkan terbatasnya kapasitas ekonomi dalam menampung angkatan kerja (Riyadi & Daeng, 2024). Sebuah studi menyebutkan Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk upah minimum dan tingkat pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi (Prihatini *et al.*, 2020). Oleh karena itu, analisis faktor-faktor tersebut penting untuk memahami dinamika ketenagakerjaan di suatu daerah. (Kementerian Ketenagakerjaan, 2025) menyatakan bahwa sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, Sulawesi menyumbang 7,12% terhadap total tenaga kerja nasional, yang menunjukkan peran penting wilayah ini dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia. Pulau Sulawesi memiliki komposisi akan angkatan kerja yang berbeda. Di Pulau Sulawesi yang paling tinggi adalah Sulawesi Selatan dengan kontribusi 44.8%, yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang lebih berkembang dan juga sebagai pusat perdagangan dan jasa. Sebaliknya, kontribusi terendah berasal dari Provinsi Gorontalo sebesar 6,0%, yang disebabkan oleh struktur ekonomi yang masih terbatas sehingga peluang kerjanya relatif lebih sedikit. Kemudian disusul oleh Provinsi Sulawesi Tengah 15.7%, Sulawesi Tenggara 13.7%, Sulawesi Utara 12.5%, Sulawesi Barat 7.2%.

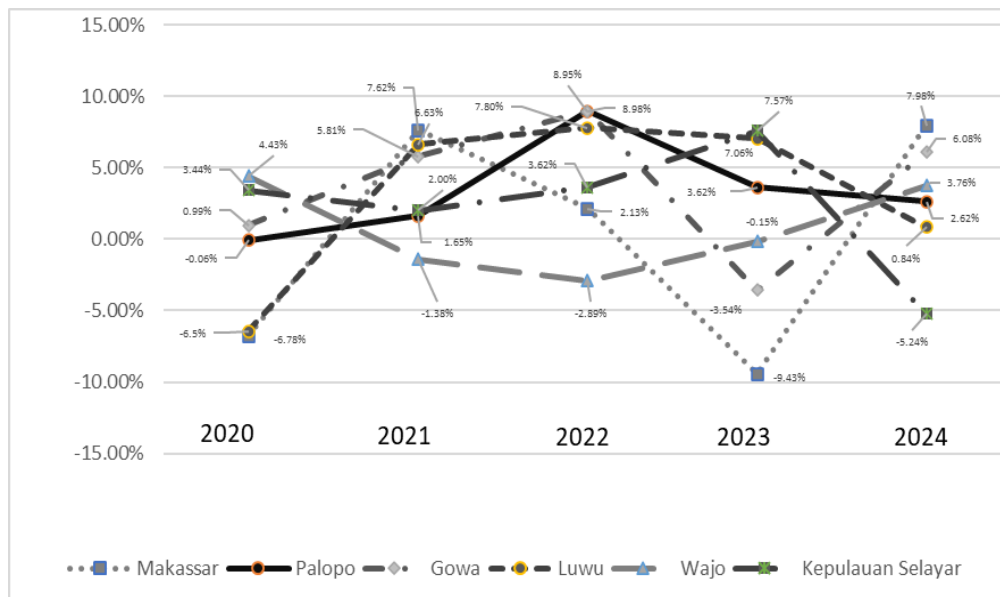


Gambar 1. Distribusi Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pola distribusi angkatan kerja yang terkonsentrasi pada beberapa wilayah inti yang mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah (Arsyad, 2012). Berdasarkan grafik, Kota Makassar menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 14,26%, diikuti Kabupaten Gowa sebesar 9,26%. Besarnya kontribusi Makassar berkaitan dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Kawasan Timur Indonesia. Keberadaan sektor formal seperti perdagangan modern, jasa keuangan, transportasi, pendidikan tinggi, dan fasilitas kesehatan membuat peluang kerja di Makassar jauh lebih luas dibandingkan daerah lainnya. Arus urbanisasi dan masuknya tenaga kerja dari wilayah sekitar juga meningkatkan jumlah angkatan kerja di kota ini.

RESEARCH ARTICLE

Sementara itu, Kabupaten Gowa berada pada posisi kedua karena berfungsi sebagai daerah penyangga (*hinterland*) bagi Makassar dalam kawasan metropolitan Mamminasata. Mobilitas komuter, pertumbuhan kawasan permukiman, serta aktivitas pendidikan dan perdagangan yang terus meningkat menjadikan Kabupaten Gowa sebagai wilayah dengan dinamika ekonomi yang kuat. Kombinasi sektor jasa dan pertanian turut memperkuat kontribusinya terhadap pembentukan angkatan kerja di provinsi ini.



Gambar 2. Laju Penyerapan Tenaga Kerja di Enam Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2020–2024

Di Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi penyerapan tenaga kerja masih menunjukkan perbedaan dan fluktuasi antar kabupaten/kota selama periode 2020–2024. Berdasarkan Gambar 2, beberapa daerah seperti Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, sedangkan Kabupaten Wajo dan Kepulauan Selayar mengalami penurunan pada beberapa tahun tertentu. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menyediakan kesempatan kerja masih belum merata dan dipengaruhi oleh perkembangan sektor ekonomi serta proses pemulihan pascapandemi (Todaro & Smith, 2006). Perbedaan penyerapan tenaga kerja antarwilayah diduga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Upah minimum berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja sehingga dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja (Prihatini *et al.*, 2020). Upah juga merupakan kompensasi atas produktivitas tenaga kerja dalam proses produksi (Clark, 1908). Pendidikan juga menjadi faktor penting karena tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki keterampilan dan daya saing yang lebih baik di pasar kerja (Tjiu & Rusianti, 2022). Pendidikan mencerminkan kualitas modal manusia yang dapat meningkatkan peluang kerja dan produktivitas tenaga kerja (Becker, 1993). Adapun (Narayana *et al.*, 2025) selain itu, pertumbuhan ekonomi secara teoritis mampu meningkatkan kesempatan kerja, namun pada beberapa daerah pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja karena masih didominasi sektor padat modal. Penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja, sehingga belum memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh upah minimum, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan (Yanda *et al.*, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menyoroti sejumlah faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah. Menurut Todaro dan Smith (2006), tingkat penyerapan tenaga kerja merupakan indikator utama yang mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif. Faktor ekonomi seperti upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja, sebagaimana dijelaskan oleh Prihatini *et al.* (2020), yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas, sehingga berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, teori klasik yang dikemukakan oleh Clark (1908) menyebutkan bahwa upah merupakan kompensasi atas produktivitas marginal pekerja dan bahwa peningkatan upah harus diimbangi dengan peningkatan output agar tidak mengurangi jumlah tenaga kerja yang terserap. Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan juga menjadi aspek penting yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja, sebagaimana dijelaskan oleh Becker (1993), bahwa peningkatan kualitas modal manusia melalui pendidikan akan meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di pasar kerja. Tjiu dan Rusianti (2022) menambahkan bahwa tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk terserap dan mampu bersaing secara lebih efektif. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi secara umum dianggap mampu meningkatkan kesempatan kerja, namun kenyataannya di berbagai daerah, pertumbuhan ekonomi belum selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja secara signifikan, terutama jika sektor ekonomi yang berkembang bersifat padat modal dan tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Narayana *et al.*, 2025). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam memengaruhi dinamika ketenagakerjaan, sehingga analisis secara simultan menjadi penting untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif (Yanda *et al.*, 2022). Dengan demikian, kajian ini memperkuat pentingnya memahami hubungan antara upah minimum, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan metode kuantitatif untuk menguji hubungan antara variabel-variabel. Penelitian ini menggunakan data panel untuk periode 2017–2024 di enam Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (Gujarati, 2003). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi panel. Berikut merupakan perumusan persamaan model pada regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{LogPTK}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogUM}_{1it} + \beta_2 P_{2it} + \beta_3 PE_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Rumus tersebut menjelaskan bahwa PTK merupakan penyerapan tenaga kerja pada wilayah i dan waktu t dalam bentuk logaritma. Variabel UM adalah upah minimum, P menunjukkan pendidikan, dan PE merepresentasikan pertumbuhan ekonomi. Koefisien β_1 , β_2 , dan β_3 menggambarkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan ε merupakan error term yang mencakup faktor-faktor lain di luar model. Pengujian regresi data panel dilakukan melalui 3 tahapan uji, yaitu Uji Chow untuk membandingkan common effect dengan *Fixed Effect*, Uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect* atau *Random Effect* dan Uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan kelayakan model *Random Effect* dibandingkan *Common Effect*. Selanjutnya dilakukan Uji F , Uji T dan Koefisien Determinasi untuk menguji signifikansi dan kekuatan pengaruh antar variabel.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Tabel 1. Rata-Rata Upah Minimum, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2017–2024

Daerah	Upah Minimum	Pendidikan	Pertumbuhan Ekonomi	Penyerapan Tenaga Kerja
Makassar	3.134.606	11,35	5,61	604.500
Gowa	3.019.846	8,15	5,83	382.099
Wajo	3.019.846	7,04	3,04	192.068
Luwu	3.019.846	8,33	5,37	166.444
Palopo	3.019.846	10,83	5,24	78.237
Kepulauan Selayar	3.019.846	7,89	4,62	68.117
Rata-Rata	3.038.972	8,93	4,95	248.577
Rata-Rata Provinsi Sulawesi Selatan	3.024.978	8.41	4.96	4.112.037

Tabel 1 memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan di enam kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017–2024. Rata-rata jumlah tenaga kerja di Sulawesi Selatan mencapai 248.577 orang. Kota Makassar tertinggi dengan 604,500 orang karena kekuatan sektor jasa, perdagangan, dan industri. Kepulauan Kabupaten Selayar terendah dengan 68,117 orang, dominan sektor primer seperti pertanian dan perikanan, namun sektor jasa dan industri pengolahan mulai berkembang. Struktur ekonomi sangat memengaruhi penyerapan tenaga kerja di tiap daerah. Perbedaan ini menggambarkan ketimpangan kapasitas ekonomi antardaerah yang berpengaruh pada variasi kemampuan penyerapan tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2024).

Tabel 2. Uji Penentuan Model Regresi Panel

Jenis Uji	Prob	Hipotesis	Model terpilih
Chow	0.00	H0 Ditolak	Fixed Effect Model
Hausman	0.30	H0 Diterima	Random Effect Model

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji chow menunjukkan probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, maka H0 ditolak dan model yang sesuai adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji Hausman yang memiliki probabilitas sebesar $0,2981 > 0,05$, H0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*. Dengan demikian, analisis regresi panel dalam studi ini menggunakan model Random effect sebagai model estimasi akhir.

Tabel 3. Random Effect Model (REM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob
UM (Upah Minimum)	0.40**	0.15	2.65	0.011
P (Pendidikan)	0.12*	0.05	2.30	0.026
PE (Pertumbuhan Ekonomi)	0.004	0.00	1.33	0.190
R-squared (R2)				0.75
Adjusted R-squared				0.73
F-statistik				44.58
Prob (F-statistik)				0.00
N				48

$$\text{LogPTK}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogUM}_{1it} + \beta_2 P_{2it} + \beta_3 PE_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan Tabel 2, model yang dipilih adalah Random effect model dengan persamaan model dan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 3 untuk penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Variabel upah minimum memiliki koefisien 0,4 dengan nilai probabilitas $0,01 < 0,05$. Variabel pendidikan menunjukkan koefisien sebesar 0,12 dengan probabilitas $0,02 < 0,05$. Pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien 0,004 dengan probabilitas $0,19 > 0,05$. Hasil regresi *Random Effect Model*, nilai konstanta sebesar 5,07. Sedangkan nilai adjusted *R-squared* sebesar 0,73 menandakan bahwa 73% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh model, sementara 27% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian ini. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel upah minimum, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik.

4.2 Pembahasan

Tabel 1 memperlihatkan penyerapan tenaga kerja tertinggi tercatat di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, yang keduanya berada di atas rata-rata enam daerah namun dibawah rata-rata Provinsi. Hal ini didukung dengan data (Badan Pusat Statistik, 2025) yang mencatat Kota Makassar memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi di enam daerah di Provinsi Sulawesi Selatan karena menjadi pusat utama aktivitas ekonomi dengan sektor jasa, perdagangan, dan industri yang berkembang pesat, rata-rata pendidikan masyarakat Kota Makassar yang lebih tinggi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga memperkuat kemampuan mereka untuk terserap di sektor formal. Infrastruktur yang baik dan terkonsentrasinya aktivitas ekonomi menciptakan lingkungan kondusif bagi perusahaan berkembang, sehingga membuka lebih banyak peluang kerja baru. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ikridah & Ramli, 2024) yang menunjukkan bahwa Kota Makassar menjadi daerah dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja tertinggi sepanjang periode pengamatan. Berbeda halnya dengan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks dan unik. Struktur ekonominya masih sangat didominasi oleh sektor primer (Adhan, 2022) terutama pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan yang menjadi penyumbang utama penyerapan tenaga kerja. Selain itu, sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa kemasyarakatan, sosial, dan perumahan mulai memberikan kontribusi meskipun belum signifikan (Adhan, 2022). Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer ini mencerminkan tantangan dalam diversifikasi ekonomi di wilayah kepulauan seperti Selayar. Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer ini mencerminkan tantangan dalam diversifikasi ekonomi. Kondisi geografis kepulauan membatasi pengembangan infrastruktur dan investasi, sehingga memengaruhi kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas (Badan Pusat Statistik, 2025). Penelitian (Adhan, 2022) yang menguatkan bahwa struktur ekonomi daerah ini masih didominasi sektor primer dan menyoroti sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa pendidikan sebagai sektor potensial untuk dikembangkan Selain itu, (Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kepulauan Selayar, 2025) menegaskan bahwa kondisi infrastruktur terbatas di wilayah terpencil mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan sedikit peluang kerja baru, menjadikan Selayar sebagai daerah dengan penyerapan tenaga kerja terendah di Sulawesi Selatan. Dari hasil analisis upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, bahwa rata-rata kenaikan upah sebesar Rp. 3.038.972 akan menaikkan penyerapan tenaga kerja sebesar 248.577 orang. Hal ini bertentangan dengan teori yang diusulkan oleh (Borjas, 2019) yang menyatakan bahwa upah seharusnya mencerminkan produktivitas marginal pekerja. Dalam pasar yang kompetitif, upah akan bergerak menuju nilai produk marginal tersebut, jika upah minimum ditetapkan terlalu tinggi, perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja atau jam kerja sehingga penyerapan tenaga kerja menurun. Walaupun demikian, hasil penelitian ini tetap selaras dengan temuan penelitian sebelumnya dan (Ratnasari & Nugraha, 2021) menemukan bahwa upah minimum memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Dengan demikian, kenaikan upah tidak selalu menurunkan tenaga kerja sebagaimana dijelaskan dalam teori klasik, tetapi dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, kenaikan upah justru mampu mendorong peningkatan tenaga kerja, sehingga kebijakan upah minimum dapat dianggap efektif apabila diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan

RESEARCH ARTICLE

struktur pasar kerja yang adaptif (Rahmi & Riyanto, 2022). Pada tahun 2017, kenaikan Upah Minimum di Sulawesi Selatan tidak menyebabkan penurunan lapangan kerja, justru penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan (Badan Pusat Statistik, 2018). Hal ini terjadi karena peningkatan upah mendorong daya beli masyarakat, akibatnya aktivitas ekonomi lokal terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan UMKM semakin berkembang (Bank Indonesia Sulawesi Selatan, 2018). Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut memicu permintaan barang dan jasa yang lebih tinggi, maka pelaku usaha memperluas kegiatan usahanya dan memerlukan tenaga kerja tambahan. Selain itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor-sektor padat karya di Sulawesi Selatan tetap tumbuh positif sepanjang 2017, sehingga penyerapan tenaga kerja tetap terjaga dan bahkan mengalami peningkatan. Struktur ekonomi daerah yang adaptif serta produktivitas pekerja yang meningkat turut memperkuat kondisi pasar kerja pada tahun tersebut (Titin, 2022). Pada tahun 2019, upah minimum di Sulawesi Selatan sebagai upaya menyesuaikan upah pekerja dengan kebutuhan hidup layak dan tingkat inflasi yang terjadi di daerah dan nasional. Kenaikan ini juga dilakukan untuk menjamin kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Badan Pusat Statistik, 2019). Di sisi lain, perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun yang sama menunjukkan kinerja yang kuat, terutama di sektor industri pengolahan dan perdagangan yang berkembang pesat. Kondisi ini mendorong perluasan usaha sehingga tercipta lebih banyak lapangan kerja (Kementerian Keuangan RI, 2019). Selain itu, data ketenagakerjaan menunjukkan penurunan jumlah pekerja informal, yang mengindikasikan sebagian beralih ke pekerjaan formal dengan upah lebih layak. Fenomena ini didukung oleh kenaikan tingkat upah minimum yang diikuti dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2017-2022.

Pada Kabupaten Gowa terjadi peningkatan upah justru meningkatkan penyerapan tenaga kerja, hal ini dikarenakan upah yang lebih tinggi meningkatkan daya tarik pekerjaan bagi angkatan kerja, terutama bagi pekerja dengan keterampilan rendah yang sebelumnya enggan bekerja dengan upah rendah (Dinas Ketenagakerjaan, 2024). Selain itu, ekspansi industri lokal di Gowa yang terus berkembang turut menyediakan lapangan kerja baru, sehingga kenaikan upah dapat diserap oleh perusahaan tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja yang direkrut (Aminullah *et al.*, 2023). Kenaikan upah minimum di Kabupaten Gowa pada tahun 2024 disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang positif yang menciptakan lebih banyak peluang kerja dan makin banyak tenaga kerja terserap di pasar kerja. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung dan kondisi ekonomi yang membaik menjadi alasan mengapa kenaikan upah beriringan dengan naiknya penyerapan tenaga kerja pada 2024 di Kabupaten Gowa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2024). Kenaikan juga terjadi pada Kabupaten Kepulauan Selayar, struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, jadi dapat dikatakan bahwa sektor primer menjadi penopang utama PDRB. Namun, dari sisi ketenagakerjaan, terjadi kecenderungan pergeseran struktur penyerapan tenaga kerja. Jika pada awal periode 2017–2019 tenaga kerja banyak terserap di sektor primer, sedangkan pada periode 2021–2023 sektor jasa mulai menunjukkan peningkatan peran dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, lapangan kerja di Selayar tidak semata-mata berasal dari sektor primer, tetapi juga melibatkan sektor sekunder dan tersier yang mulai tumbuh meskipun belum optimal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2023). Pada Kabupaten Luwu juga mengalami kenaikan upah karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi lokal semakin berkembang dan menciptakan permintaan tenaga kerja yang lebih besar. Pelaku usaha di Luwu juga tetap mempertahankan bahkan menambah tenaga kerja untuk menjaga produktivitas ketika upah meningkat. Hal ini terjadi karena pasar kerja daerah ini didominasi sektor-sektor padat karya yang lebih responsif terhadap perubahan upah (Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, 2022). Selain itu, kenaikan upah dapat meningkatkan motivasi kerja, menekan tingkat turnover tenaga kerja, serta menjaga stabilitas pasar tenaga kerja. Kecenderungan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, yang juga menunjukkan peran kebijakan upah dan pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2022). Secara keseluruhan, kondisi tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Luwu memiliki kemampuan ekonomi yang cukup adaptif terhadap kenaikan upah, sehingga penyerapan tenaga kerja tetap terjaga secara positif dari tahun sebelumnya hingga tahun 2024.

RESEARCH ARTICLE

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, di mana untuk setiap peningkatan rata-rata lama pendidikan selama 1 tahun dari rata-rata 8,93 tahun. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (World Bank, 2020) menyatakan bahwa peningkatan tingkat pendidikan berkontribusi terhadap kualitas modal manusia yang pada akhirnya meningkatkan peluang memperoleh pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih baik, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Rahayu, 2020). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian (Tjiu & Rusianti, 2022). Oleh karena itu, pendidikan memainkan peran penting dalam memperkuat penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan, terutama melalui peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Pada tahun 2020, pendidikan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang menunjukkan perbaikan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Namun, penyerapan tenaga kerja belum meningkat secara signifikan karena adanya beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja serta dampak ekonomi COVID-19 yang menghambat pertumbuhan sektor usaha dan penciptaan lapangan kerja (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021). Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan keterampilan di dunia kerja menyebabkan lulusan pendidikan belum sepenuhnya dapat langsung terserap di pasar kerja (Agustina *et al.*, 2020). Oleh karena itu, peningkatan pendidikan menjadi fondasi penting jangka panjang, namun faktor eksternal dan dinamika ekonomi sementara mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada tahun tersebut. Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat ketidaksesuaian data untuk beberapa kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Wajo dan Kota Palopo. Pada tahun 2021-2023 Kabupaten Wajo mengalami peningkatan terlihat dari tingkat partisipasi sekolah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas guru serta fasilitas pendidikan. Namun, penyerapan tenaga kerja tidak bertambah signifikan karena keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal dan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja lokal (Kabupaten Wajo Dalam Angka, 2024). Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang telah menyebabkan perlambatan ekonomi sehingga lapangan pekerjaan baru sulit terbentuk, meskipun tingkat pendidikan meningkat (Badan Pusat Statistika, 2024). Pada Kota Palopo, rata-rata lama sekolah naik dari 10,51 pada tahun 2018 menjadi 10,76 tahun di 2020, namun tingkat pengangguran terbuka meningkat akibat mismatch keterampilan lulusan dengan sektor perdagangan-jasa lokal kontribusi PDRB di mana kurikulum pendidikan tidak selaras dengan kebutuhan UMKM dan keterbatasan lapangan kerja formal (Badan Pusat Statistika, 2020).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi 4,95% dan penyerapan tenaga kerja 248.577 orang di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. tetapi pengaruhnya tidak kuat secara statistik. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh ILO, (2020) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada umumnya diiringi oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja, karena ekspansi kegiatan ekonomi dan peningkatan output akan mendorong penciptaan lapangan kerja serta memperluas kebutuhan tenaga kerja dalam proses produksi. Akan tetapi, secara empiris pada Provinsi Sulawesi Selatan, hubungan yang terbentuk meskipun searah dengan teori yaitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja belum mencerminkan pengaruh yang kuat, temuan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Yanda *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja tidak selalu signifikan secara statistik karena faktor-faktor lain juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2020, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ini tidak disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang justru mengalami penurunan. Kondisi ini berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan pada sektor-sektor padat karya seperti industri dan perdagangan, sehingga aktivitas ekonomi yang berorientasi pada tenaga kerja menurun meskipun sektor berbasis teknologi tetap tumbuh positif (Badan Pusat Statistik, 2021). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat tidak merata karena didominasi oleh sektor-sektor yang lebih padat modal dan teknologi (Rahman, 2022) dan (Kementrian Keuangan, 2020) sehingga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif terbatas.

RESEARCH ARTICLE

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia juga turut membatasi peluang angkatan kerja untuk terserap di pasar kerja, meskipun nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat (Hasanuddin, 2021). Dengan demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 menurun akibat ketidaksesuaian antara pola pertumbuhan ekonomi dan kapasitas penciptaan lapangan kerja. Dari enam daerah di Sulawesi Selatan yang mengalami pertumbuhan ekonomi, terdapat kecenderungan penyerapan tenaga kerja yang meningkat sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kecuali Kabupaten Gowa dan Kabupaten Wajo, meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja di kedua daerah tersebut tidak meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor spesifik daerah yang memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja di luar efek langsung pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa variabel upah minimum dan pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti peningkatan upah minimum dan rata-rata lama sekolah terbukti mampu memperluas kesempatan kerja diberbagai daerah. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya memiliki dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja karena sektor-sektor yang mendominasi masih belum banyak menyerap tenaga kerja. Hasil penelitian ini menekankan bahwa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sektor padat karya, serta pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah agar penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan dapat meningkat secara berkelanjutan.

6. Referensi

- Adhan, N. H. (2022). Analisis penyerapan tenaga kerja di Kepulauan Selayar.
- Agustina, *et al.* (2020). Statistik pendidikan 2020.
- Aminullah, Rahman, & Arifin. (2023). Pengaruh upah minimum dan jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan. *Center of Economic Student Journal*, 6(4), 2621–8186. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.1128>.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital* (3rd ed.). Library of Congress Cataloging.
- Borjas, G. J. (2019). *Labor economics* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Clark, J. B. (1908). *The distribution of wealth: A theory of wages, interest, and profits*.
- Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kepulauan Selayar. (2025). Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan.
- Hasanuddin, M. (2021). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. *Kabupaten Wajo dalam angka* (2024).
- Ikridah, N., & Ramli, B. (2024). Penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 4(2), 1–13. <https://doi.org/10.24252/best.v4i2.50501>.

RESEARCH ARTICLE

- International Labour Organization. (2020). *Does economic growth deliver jobs? Revisiting Okun's Law*. Geneva: ILO Publications.
- Narayana, A., *et al.* (2025). Pengaruh upah minimum, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2015–2023. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 1–14.
- Rahayu, Y. (2020). Pengaruh upah dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Development*, 8(2), 1–15.
- Rahman, A. (2022). Determinan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi*.
- Rahmi, J., & Riyanto, R. (2022). Dampak upah minimum terhadap produktivitas tenaga kerja: Studi kasus manufaktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(1), 1–12.
- Ratnasari, D., & Nugraha, J. (2021). Pengaruh UMK, pendidikan, jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja di kota. *Journal of Economics*, 1(2), 1–17.
- Riyadi, M., & Daeng, A. (2024). Analisis determinan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Kota Mataram. Dalam *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 3(2).
- Smith, A. (2005). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. The Pennsylvania State University.
- Titin. (2022). Pengaruh pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan upah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Makassar.
- Tjiu, H., & Rusianti, A. (2022). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Merauke tahun 2013–2018. *Jurnal Honai*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.61578/honai.vol2.no1.art3>.
- World Bank. (2020). *The human capital index 2020: Human capital in the time of COVID-19*. World Bank Publications.
- Yanda, F. A., Saleh, S. E., & Dai, S. I. S. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi. *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.46918/point.v4i2.1635>.